

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan represif yang diterapkan oleh Pemerintah Cina di Xinjiang merupakan strategi dari kepentingan nasionalnya guna menanggulangi ancaman sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Semua konsep yang dipakai dalam penelitian ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam hierarki strategi Cina. *National interest* adalah dorongan dasar Cina menerapkan *offensive security* untuk mengejar *power maximization* yang bermuara pada pencapaian *regional hegemony*.

Berangkat dari pemberontakan oleh Etnis Uighur yang terjadi di Xinjiang, faktanya kebijakan represif yang diterapkan Cina mempunyai ujung muara pada ambisinya untuk mengejar hegemoni regional di Kawasan Asia Tengah. Kebijakan yang diberlakukan di Xinjiang merupakan salah satu dari banyaknya hal yang harus dipersiapkan dalam mencapai hegemoni regional. Kebijakan tersebut merupakan satu sisi aspek kepentingan nasional Cina yang harus dipenuhi, berbarengan dengan sisi aspek lainnya yaitu peningkatan kekuatan ekonomi melalui kontrol penuh terhadap SDA dan geopolitik Xinjiang.

Sebagaimana alur berpikir realisme ofensif, kepentingan nasional merupakan tujuan utama Cina untuk melindungi kelangsungan hidupnya di tengah sistem internasional yang anarki, dimana tidak ada entitas mutlak yang dapat mengatur sistem tersebut. Cina mau tidak mau harus bersikap egois demi memenuhi

kebutuhan hidupnya. Dengan narasi bahwa tidak ada yang dapat menolong kecuali negara itu sendiri yang menolong dirinya, membuat negara harus mengutamakan kepentingan nasionalnya diatas yang lainnya. Kerangka berpikir inilah yang diterapkan oleh Cina melalui Xinjiang, yang dapat diibaratkan sebagai “*missing puzzle*” yang selama ini dicari Cina untuk melengkapi strateginya dalam mengejar hegemoni.

Dengan memiliki kontrol penuh terhadap keamanan dan penguasaan sumber daya strategis di Xinjiang guna memastikan akses penting bagi keberlanjutan ekonominya, Cina dapat memastikan keamanan teritorialnya terjamin untuk melindungi integritas wilayah dari ancaman internal maupun eksternal. Penerapan kebijakan represif yang merupakan respon dari pemberontakan etnis di Xinjiang adalah refleksi dari konsep *offensive security*, dimana kebijakan tersebut merupakan bentuk dari strategi proaktif Cina. Strategi preventif ini dilakukan untuk meminimalisir ancaman lebih besar dalam bentuk separatisme dan terorisme, yang tentu saja akan berdampak pada stabilitas domestik Cina dan pada akhirnya memberikan “ruang” bagi masuknya kekuatan asing yang ingin melemahkan kedudukannya.

Perilaku Cina dalam memaksimalkan kekuatan militer dan melakukan ekspansi ekonomi besar-besaran dapat dipahami melalui konsep *power maximization*. Cina memaksimalkan kekuatannya sebagai bentuk dari penguatan internal yang bertujuan jangka panjang. Upaya Cina dalam memastikan kapabilitasnya di semua dimensi (militer, ekonomi dan politik) ditujukan untuk memperoleh keunggulan dibandingkan negara lain. Cina memastikan bahwa

sebelum melakukan ekspansi ke ranah yang lebih luas, pondasi domestiknya sudah kokoh dan cukup untuk menopang strategi dan langkah yang akan diambil berikutnya.

Cina memegang prinsip bahwa dirinya harus berada di puncak piramida agar dapat merasa aman dan tidak dalam tekanan ataupun ketergantungan terhadap negara lain. Xinjiang adalah wilayah strategis “panas” yang menjadi kunci keberhasilan strategi Cina dalam memperkuat hegemoninya di Asia Tengah. Maka dari itu, Cina berusaha untuk mendominasi wilayah tersebut sebagai langkah untuk memastikan stabilitas domestik dan mengantisipasi pengaruh eksternal. Cina juga menghabiskan dana yang sangat besar untuk pembangunan ekonominya di Xinjiang guna mengalahkan rivalnya, yaitu Rusia dan Amerika Serikat.

Pada dasarnya, penulis tidak setuju dengan kebijakan represif yang diterapkan terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Jika ditinjau dari aspek budaya dan kemanusiaan, penulis meyakini bahwa seharusnya setiap manusia mendapatkan hak yang setara dan kebebasan yang sama dalam menjalankan kehidupannya. Terlebih lagi penulis memiliki latar belakang dan ikatan agama yang sama dengan mereka. Namun, tindakan Cina ini adalah sesuatu yang logis berdasarkan perspektif realisme ofensif. Jika *great power* manapun dihadapkan dengan situasi yang sama, maka diyakini bahwa mereka cenderung akan melakukan hal yang sama untuk melindungi posisi mereka dalam dunia internasional yang anarki ini.

4.2 Saran

Penelitian ini telah menemukan analisa teoritis untuk menjawab rumusan masalah mengenai alasan penerapan kebijakan represif terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Penelitian ini mampu menjelaskan bagaimana pilihan penerapan kebijakan represif adalah pilihan rasional yang dilakukan Cina. Namun pada kenyataannya, kebijakan ini menimbulkan banyak pro dan kontra tentang bagaimana penerapan kebijakan tersebut dilaksanakan, termasuk adanya tuduhan bahwa kebijakan tersebut melanggar HAM. Maka dari itu, penulis menyarankan untuk Pemerintah Cina agar lebih terbuka terkait penerapan kebijakan tersebut agar masyarakat luas dapat melihat adanya transparansi dan tidak berujung pada kesalahpahaman pendefinisian perilaku ini sebagai tindak pelanggaran HAM.